

Bila Terdakwa Jadi Wali Kota

Kasus Wali Kota Tomohon mestinya membuat malu kita semua. Seorang tersangka korupsi tetap dicalonkan oleh partai politik menjadi pemimpin kota di Sulawesi Utara ini. Setelah menang dalam pemilihan kepala daerah, wali kota terpilih ini pun membuat rekor yang lebih ganjil: dilantik dalam status terdakwa.

Jefferson Soleiman Montesquieu Rumajar, wali kota terpilih itu, dinobatkan pula lewat prosesi yang langka. Ia bersama wakilnya, Jimmy F. Eman, dilantik dalam sebuah rapat paripurna istimewa dewan perwakilan rakyat daerah. Perhelatan ini tidak diadakan di Kota Tomohon, melainkan di gedung Kementerian Dalam Negeri. Mau tak mau, seluruh anggota DPRD Tomohon diboyong ke Jakarta.

Langkah itu dianggap sebagai terobosan karena terdakwa tidak mungkin dibawa ke daerahnya lantaran ia ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jefferson, yang dijerat kasus korupsi anggaran daerah yang merugikan negara Rp 19,8 miliar, bahkan telah menjalani sidang pertamanya beberapa hari sebelumnya.

Masalahnya, publik jelas merasa risi melihat seorang terdakwa tetap diperlakukan secara terhormat. Yang malu bukan hanya penduduk Tomohon, tapi juga sebagian besar rakyat di negeri ini. Apalagi, setelah dilantik, Jefferson segera bertindak sebagai wali kota yang sah. Pejabat yang diusung oleh Partai Golkar ini mengatur tekek-bengek urusan pemerintah daerahnya dari balik jeruji Lembaga Pemasarakatan Cipinang, Jakarta.

Kalaupun acara formalitas itu sulit dihilangkan, kenapa ia tidak segera dinyatakan sebagai wali kota nonaktif setelah dilantik? Alasan pemerintah bahwa penonaktifan Jefferson masih menunggu usul gubernur sungguh mengada-ada. Soalnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mensyaratkan hal ini. Di situ jelas dinyatakan bahwa presiden dapat memberhentikan sementara seorang kepala daerah yang didakwa korupsi. Langkah ini bisa dilakukan tanpa usul siapa pun, termasuk DPRD.

Peristiwa yang tak wajar itu bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, Kusen Andalas tetap dilantik menjadi Wakil Bupati Jember, Jawa Timur, sekalipun berstatus sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi. Indonesia Corruption Watch mencatat, selain Jefferson, masih ada delapan kepala daerah yang diduga terlibat korupsi terpilih lagi dalam pemilihan.

Orang tak habis pikir kenapa partai-partai tetap menyokong figur yang tak bersih untuk menjadi kepala daerah. Partai politik bahkan membiarkan masyarakat memilih calon pemimpin yang jelas telah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Sikap ini tidak hanya membodohi rakyat, tapi juga merusak mekanisme demokrasi, yang seharusnya bisa melahirkan pemimpin terbaik di daerah.

Agar kejadian itu tak terulang, aturan pemilihan kepala daerah perlu diperketat. Selama ini undang-undang tidak melarang seorang tersangka menjadi calon kepala daerah. Aturan inilah yang harus direvisi agar etika penyelenggaraan negara tetap terjaga. Tak sepatutnya pula anggaran negara dihambur-hamburkan hanya untuk menggelar pemilihan bagi para tersangka yang kemudian harus dinonaktifkan setelah jadi terdakwa. ●

KUTIPAN

“Jadikan saya staf ahli: Kapolri, Jaksa Agung, atau Ketua KPK. Saya janji, dalam dua tahun Indonesia bersih.”

Terdakwa kasus mafia pajak **Gayus Tambunan**, kemarin di Jakarta, gemas karena sampai saat ini hanya ia dan sejawatnya PNS golongan menengah yang diseret ke pengadilan.

“Mereka melakukan kesalahan di lapangan.”

Menteri Perhubungan **Freddy Numberi**, kemarin di Jakarta, melemparkan tanggung jawab berkaitan dengan kenaikan tarif kereta api yang hanya berlaku sehari kepada PT Kereta Api.

“Jangan hanya ngomong. Tangkap itu orang.”

JAKARTA — Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menengarai adanya penyanggah dana yang membiayai Gayus H. Tambunan selama mendekam di penjara. “Yang jelas, ada orang yang membiayai selama dia di tahanan,” kata Kepala Badan Riset Kriminologi Polri Komisararis Jenderal Ito Sumardi di Balai Sidang Jakarta (JCC), Senayan, kemarin.

Menurut Ito, polisi masih menelusuri bagaimana Gayus bisa keluar dari tahanan sampai puluhan kali. Polisi pun akan mengusut siapa yang menemani Gayus bepergian dan siapa yang ditemuinya di luar negeri. Saksi yang akan ditanyai polisi di antaranya Milana Anggraeni, istri Gayus, yang kerap menyertai suaminya keluyuran meninggalkan penjara.

Ito menambahkan, Polri

Polisi Endus Penyokong Dana Gayus

telah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Selain untuk mengungkap penyanggah dana Gayus, kata Ito, kerja sama antarlembaga diperlukan untuk melacak harta Gayus di luar negeri. “Kami juga meminta kerja sama dengan negara yang disinggahi Gayus,” kata Ito.

Gayus puluhan kali meninggalkan Rumah Tahanan Markas Komando Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok. Dia pernah keluyuran ke Bali, Malaysia, Singapura, dan Cina. Gayus keluyuran ke mancanegara menggunakan paspor atas nama Sony Laksono.

Sejauh ini Gayus tidak membantah ataupun membenarkan kabar kepergian dia ke luar negeri. Yang jelas, menurut Gayus, ada pihak

tertentu yang menggelandingkan isu itu untuk menghabisinya. “Intinya, biar saya matilah,” kata Gayus sebelum menjalani sidang kemarin.

Menurut Gayus, isu keluyuran ke luar negeri diembuskan pihak tertentu untuk mengaburkan pembelaan dia di pengadilan. Dalam nota pembelaannya, Gayus mengaku tertipu oleh tim khusus Polri yang belum menindaklanjuti pengakuan dia soal permainan mafia pajak.

Pengacara Gayus, Adnan Buyung Nasution, meminta Polri tak hanya melontarkan isu ihwal penyokong dana Gayus. “Jangan hanya ngomong. Tangkap itu orang,” kata Buyung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. “Supaya masyarakat tahu siapa otak di belakang ini.”

Sebagai kuasa hukum, Bu-

nyung mengaku tak tahu pihak mana yang membiayai Gayus selama ini. Apalagi, kepada tim kuasa hukumnya, Gayus pernah menyangkal soal kepergian dia ke Bali pada November tahun lalu. “Dia dulu bohong ke saya,” ujar Buyung.

Ihwal keluyurannya Gayus ke luar negeri, Buyung meminta aparat tak hanya menjadikan kliennya sebagai tumbal. Buyung yakin Gayus bisa bebas jalan-jalan karena ada permainan dengan aparat. “Kalau enggak ada permainan, enggak mungkin.”

Buyung pun meminta aparat memperketat penjagaan terhadap Gayus, yang kini ditahan di Cipinang, Jakarta Timur. “Kalau enggak, nanti bisa saja dia dihilangkan,” kata Buyung.

● ISMA SAVITRI | MUNAWWAROH | FEBRIYAN | CORNILA DESYANA

Jika Terdakwa Ingin Membasmi Korupsi

Indonesia yang bebas dari korupsi ternyata juga diidamkan Gayus Halo-moan P. Tambunan. Setidaknya begitu pengakuannya di tengah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. “Saya mendukung Presiden RI memberantas korupsi, menangkap *big fish*,” katanya membacakan duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.

Terdakwa perkara mafia pajak dan peradilan ini bahkan menyatakan sangat berupaya agar mafia pajak dan peradilan diberangus sampai ke akarnya. Bak terilhami oleh film-film Hollywood, Gayus lalu mengajukan usul mengagetkan.

Ia meminta agar dijadikan staf ahli para penegak hukum khusus menggulung koruptor di negeri ini. “Jadikan saya staf ahli Kapolri, staf ahli Jaksa Agung, atau staf ahli Ketua KPK. Saya janji, dua tahun Indonesia bersih.”

Mendengar sesumbar ini, rasa-rasanya kampanye para kepala daerah dalam pilkada seperti tak ada artinya. Lihat apa yang ia janjikan selanjutnya. “Saya tak hanya tangkap kakap. Tapi paus, hiu, juga saya tangkap!” *Fiuuh*, mantap, bukan?

Ucapan Gayus itu bukan tanpa alasan. Ia saat ini tengah mengeluhkan kondisi yang dialaminya. Pasalnya, ia merasa, hanya pegawai

negeri sipil kelas menengah di Direktorat Jenderal Pajak dan kepolisian saja yang diseret ke pengadilan. “Ikan teri seperti saya, Arafat, Sri Sumartini, Alif Kuncoro, Humala, dan Maruli yang ditangkap.”

Bak gayung bersambut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar akan berterima kasih kalau Gayus mau membantu pemerintah. “Bisa dipelemparkan hukumannya kalau membongkar begitu banyak kasus. Dia harus dijadikan *whistle-blower*,” kata Patrialis di sela-sela rapat kerja pemerintah di Balai Sidang Jakarta, Senayan, kemarin.

Bagaimana dengan soal lamaran ingin menjadi staf

ahli? Jaksa Agung Basrief Syarif geleng kepala. Menurut dia, “proposal” Gayus itu mustahil diterima. Sebab, staf ahli, itu kan jabatan struktural,” katanya. Tapi Kejaksaan bisa menerima informasi dari Gayus untuk diolah guna menuntaskan pemberantasan korupsi.

Kepala Polri Jenderal Timor Pradopo pun setengah hati mengomentari lamaran Gayus. “Enggaklah. Keterangan dia kan berubah-ubah. Kalau memberikan informasi, boleh saja,” katanya. “Saya tak terpengaruh hal seperti itu.”

Gayus, apa boleh buat, lamaran Anda ditampik seketika!

● ISMA SAVITRI | MUNAWWAROH | JOBPIE S

Opera Tan Malaka Dilarang di Malang dan Kediri

JAKARTA — *Opera Tan Malaka* dilarang ditayangkan di wilayah Malang dan Kediri, Jawa Timur. Aparat setempat ber alasan, tayangan yang diproduksi *Tempo TV* itu berbau “kiri” dan bisa menimbulkan gejolak di masyarakat.

Direktur Utama *Tempo TV* Santoso mengatakan aparat di Malang dan Kediri tidak paham atas tontonan itu. “Sebagian aparat masih berpikiran kolot, alergi terhadap segala hal yang berbau kiri,” kata Santoso kemarin. “Mereka masih berpikiran seperti zaman Orde Baru.”

Tayangan *Opera Tan Malaka* merupakan hasil rekaman

atas pertunjukan teater *Opera Tan Malaka* di Teater Sali-hara, Jakarta, Oktober tahun lalu. Semula ada 10 stasiun televisi lokal yang berminat memutar rekaman opera itu. Tapi *Batu TV* Malang dan *KSTV* Kediri batal menyiarkan tontonan itu.

Adapun penayangan di delapan stasiun televisi lokal lainnya berjalan lancar. Selanjutnya opera itu masih akan disiarkan di tujuh televisi lokal lain.

Selasa lalu, seorang polisi dari Kepolisian Sektor Batu mendatangi kantor *Batu TV*. Pada waktu berbeda, stasiun televisi yang sama didatangi

anggota TNI dari Kodim 0818 Malang Batu dan anggota Korem 083/Baladhika Jaya Malang.

Peristiwa yang mirip dialami *KSTV*, yang berencana menayangkan *Opera Tan Malaka* pada 9 dan 16 Januari 2011. Namun, pada Jumat dan Sabtu lalu, orang-orang yang mengaku sebagai intel dari kantor polisi serta markas militer setempat datang dan meminta pembatalan penayangan opera itu.

Kepala Kepolisian Resor Batu Ajun Komisararis Besar Gatot Sugeng Susanto membantah anggapan bahwa pihaknya melarang pemutaran

Opera Tan Malaka. Polisi, kata dia, hanya mendatangi kantor *Batu TV* untuk mengecek laporan rencana pemutaran opera yang dikhawatirkan mengganggu ketertiban masyarakat itu. “Kami cek, lantas manajemen *Batu TV* berjanji tak menyiarkan,” katanya melalui telepon kemarin.

Menurut Gatot, polisi pun belum mengetahui isi tayangan itu. Polisi baru akan mengkaji dan menilai seluruh materi tayangan opera itu. Selanjutnya polisi akan mengeluarkan rekomendasi apakah tayangan itu layak ditonton masyarakat luas atau tidak.

● HAYATI MAULANA NUR | EKO WIDIANTO